



Desain Operasi Non-Kinetik Terpadu untuk Stabilitas Keamanan IKN Nusantara

Integrated Non-Kinetic Operations Design for Security Stability of Nusantara Capital

Anggie Yulianto Putro

Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI

Email: anggie_yp@icloud.com

Abstract

The development of the new national capital (IKN) Nusantara in East Kalimantan marks a significant geopolitical transformation with strategic implications for Indonesia's national security. The relocation of the administrative center introduces new vulnerabilities to various forms of asymmetric threats, including radicalization networks, cyber propaganda, identity-based conflicts, transnational crime, and intelligence penetration by foreign actors. This article analyzes the design of non-kinetic military campaigns and the integrated security strategy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) in anticipating and mitigating these threats. A qualitative case-study research approach is employed, supported by policy analysis and data triangulation involving military stakeholders, law-enforcement agencies, and society. The findings indicate that effective counter-asymmetric threat strategies require the integration of information networks, coordinated intelligence fusion, harmonization of legal frameworks, community-based preventive empowerment, and proactive cognitive security operations. The study also reveals persistent challenges, including fragmented authority, doctrinal overlap, regulatory gaps—particularly the absence of a tiered and adaptive National Security Law designed to integrate all levels of security encompassing internal security, state security, and national security—as well as uneven readiness in information and cyber systems. This study contributes a conceptual model for an integrated non-kinetic defense posture centered on influence-based prevention, social resilience, and institutional synergy. Policy recommendations emphasize the urgency of establishing structured joint command protocols, shared counter-radicalization doctrines, strengthening digital influence capabilities, and developing a whole-of-society security ecosystem to ensure long-term stability in the new capital region.

Keywords: *Non-kinetic defence, TNI–Polri synergy, asymmetric threat, IKN Nusantara, national security, cognitive warfare, Indonesia*

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menandai transformasi geopolitik yang signifikan dengan implikasi strategis terhadap keamanan nasional Indonesia. Peralihan pusat pemerintahan ini membuka kerentanan baru terhadap berbagai bentuk ancaman asimetris, termasuk jaringan radikalisme, propaganda siber, konflik berbasis identitas, kejahatan lintas batas, serta penetrasi intelijen oleh aktor transnasional. Artikel ini menganalisis desain kampanye militer non-kinetik dan strategi keamanan terpadu antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut. Pendekatan penelitian studi kasus kualitatif digunakan dengan dukungan analisis kebijakan serta triangulasi data dari pemangku kepentingan militer, penegak hukum, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan ancaman asimetris yang efektif memerlukan integrasi jaringan informasi, fusi intelijen yang terkoordinasi, harmonisasi kerangka hukum, pencegahan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta operasi keamanan kognitif yang bersifat proaktif. Temuan penelitian juga mengungkap adanya tantangan yang persisten, antara lain fragmentasi kewenangan, tumpang tindih doktrin, kekosongan regulasi, khususnya belum hadirnya Undang-Undang Keamanan NKRI yang dirancang bersifat bertingkat dan adaptif, yaitu mengintegrasikan semua keamanan yang mencakup keamanan dalam negeri/internal security, keamanan negara/state security, dan keamanan nasional/national security, serta ketidaksiapan sistem informasi dan siber secara merata. Studi ini memberikan kontribusi berupa model konseptual postur pertahanan non-kinetik terpadu yang berpusat pada pencegahan berbasis pengaruh, ketahanan sosial, dan sinergi kelembagaan. Rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya penyusunan protokol komando bersama yang terstruktur, doktrin bersama kontra-radikalisme, penguatan kapabilitas pengaruh digital, serta pembangunan ekosistem keamanan berbasis seluruh unsur bangsa (whole-of-society security) untuk menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan ibu kota baru.

Kata kunci: pertahanan non-kinetik, sinergi TNI–Polri, ancaman asimetris, IKN Nusantara, keamanan nasional, perang kognitif, Indonesia

1. Pendahuluan

Perkembangan lingkungan keamanan global saat ini menunjukkan terjadinya pergeseran mendasar dari pola peperangan konvensional menuju bentuk konfrontasi asimetris multidimensi yang melibatkan instrumen non-militer dan operasi berbasis pengaruh. Negara maupun aktor non-negara semakin banyak memanfaatkan

instrumen hibrida seperti serangan siber, penyebaran disinformasi, infiltrasi ideologi, operasi psikologis, dan polarisasi sosial sebagai strategi untuk melemahkan stabilitas suatu negara tanpa melibatkan konfrontasi militer langsung (Arquilla & Ronfeldt, 1996; Kilcullen, 2019). Fenomena ini menegaskan bahwa dominasi narasi, kendali ruang siber, serta kemampuan membentuk persepsi publik kini menjadi sama pentingnya, bahkan lebih menentukan, dibandingkan kekuatan tempur fisik dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam konteks Indonesia, ancaman keamanan mengalami perluasan karakter serta intensitas, terutama di wilayah-wilayah yang sedang mengalami perubahan strategis dan transformasi politik. Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN)—pusat pemerintahan baru Republik Indonesia—menjadi kawasan strategis dengan sensitivitas keamanan yang tinggi. Pembangunan IKN mendorong percepatan arus mobilitas penduduk, dinamika ekonomi, serta integrasi infrastruktur digital nasional, yang secara tidak langsung menciptakan ruang kerentanan baru bagi ancaman asimetris. Perubahan struktur demografis, interaksi sosial yang semakin kompleks, serta keterhubungan internasional yang meningkat membuka peluang bagi aktor jahat untuk melakukan penetrasi narasi ekstremisme, kejahatan siber, manipulasi opini publik, hingga infiltrasi intelijen asing.

Meskipun data menunjukkan bahwa intensitas serangan teror fisik menurun, berbagai kajian nasional mengindikasikan peningkatan signifikan aktivitas jaringan radikal di ruang digital, merefleksikan pergeseran modus operandi kelompok ekstremis menuju mekanisme propaganda, rekrutmen daring, dan pembentukan sel bawah tanah (*clandestine cells*). Laporan aparat penegak hukum serta intelijen menunjukkan keberadaan mantan narapidana terorisme, simpatisan aktif, dan arus pengaruh lintas wilayah di kawasan Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan teori “gunung es” ancaman keamanan, di mana gejala teror fisik yang menurun tidak serta merta menandakan melemahnya jaringan ekstremisme;

sebaliknya, struktur ideologis dan jaringan pendukung bergerak lebih tersembunyi, adaptif, dan memanfaatkan celah sosial maupun digital.

Fenomena serangan asimetris masa kini tidak hanya dapat berbentuk infiltrasi ideologi, tetapi juga melalui disinformasi berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI)/kecerdasan buatan dan penyebaran informasi/berita hoaks di media sosial. Kasus penyebaran berita palsu tentang proyek IKN dan penyebaran isu lingkungan serta adanya mafia tanah yang memperjualbelikan tanah di IKN diviralkan akun anonim menjadi contoh nyata perang informasi yang dapat menggerus kepercayaan publik. Situasi ini paralel dengan model perang non-kinetik di Rusia–Ukraina dan kompetisi Amerika Serikat–China yang menjadikan dominasi informasi sebagai senjata strategis tanpa peluru.

Selain itu, karakter geografis Kalimantan Timur—dengan akses maritim yang luas, wilayah perbatasan yang relatif longgar, dan lalu lintas ekonomi yang tinggi—meningkatkan risiko penyelundupan lintas negara, infiltrasi aktor transnasional, dan kompetisi geopolitik regional. Kombinasi antara geografi strategis, heterogenitas masyarakat, serta euforia pembangunan menjadikan provinsi ini bukan hanya pusat administrasi masa depan Indonesia, tetapi juga ruang strategis yang rentan terhadap operasi pengaruh, konflik identitas, dan ancaman keamanan non-tradisional.

Sayangnya, kerangka regulasi nasional belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan integrasi keamanan kontemporer. Belum adanya Undang-Undang Keamanan NKRI yang mampu mengintegrasikan semua keamanan yang mencakup keamanan dalam negeri/*internal security*, keamanan negara/*state security*, dan keamanan nasional/*national security* menyebabkan fragmentasi otoritas antara TNI sebagai instrumen pertahanan negara dan Polri sebagai pemelihara keamanan dalam negeri, sehingga respon strategis terhadap ancaman asimetris berpotensi terhambat oleh pemahaman keterpaduan yang baik. Dalam kondisi tersebut, domain non-kinetik—meliputi manajemen informasi, pengendalian narasi, pertahanan siber, penguatan kohesi sosial, dan sterilisasi ideologi—menjadi faktor penentu dalam

mewujudkan postur pertahanan modern yang efektif tanpa memicu ketegangan sosial maupun persepsi represif di mata publik.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini mengusulkan desain kampanye militer non-kinetik yang terintegrasi untuk memperkuat sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas strategis di Kalimantan Timur. Pendekatan ini menempatkan pencegahan melalui pengaruh (*deterrence by influence*), daya tahan masyarakat, dan orkestrasi institusional sebagai pilar utama pengamanan IKN pada era ancaman hibrida. Adapun tujuan penelitian ini meliputi: (1) mengidentifikasi karakter ancaman yang memengaruhi keamanan di Kalimantan Timur; (2) menganalisis struktur kampanye militer non-kinetik yang relevan; (3) mengevaluasi peluang dan tantangan sinergi TNI–Polri; serta (4) merumuskan rekomendasi strategis untuk mendukung kesiapsiagaan keamanan NKRI yang adaptif dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Literatur

Literatur keamanan kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma mendasar dari doktrin perang konvensional yang berpusat pada kekuatan fisik menuju model konfrontasi multidomain berbasis pengaruh yang menekankan dominasi informasi, keamanan kognitif, serta integrasi lintas kelembagaan sebagai ranah penentu dalam pertahanan modern (Arquilla & Ronfeldt, 1996; Brands & Yoshihara, 2019; Osinga & Sweijs, 2021). Perkembangan ini lahir dari dinamika global yang memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara tidak lagi semata-mata diwujudkan melalui agresi militer terbuka, melainkan melalui strategi halus namun sistematis berupa manipulasi persepsi, serangan informasi, dan pembentukan opini publik untuk melemahkan legitimasi pemerintah dan disintegrasi sosial. Fenomena inilah yang oleh beberapa sarjana pertahanan disebut sebagai bentuk “perang kognitif”, yaitu operasi yang menargetkan pikiran, persepsi, dan sistem nilai masyarakat sebagai medan tempur utama, mendahului bahkan menggantikan operasi kinetik tradisional.

Meningkatnya aktor non-negara dan aktor negara pesaing yang memanfaatkan ruang digital, sentimen sosial, dan jaringan transnasional menunjukkan terjadinya difusi kekuasaan dari sistem negara formal menuju sel-sel terdesentralisasi yang mampu melaksanakan gangguan psikologis dan informasi secara berkelanjutan. Kilcullen (2019) menggambarkan sebagai insurgensi hybrid non-linear, di mana batas antara domain perang fisik, ruang informasi, dan dinamika sosial melebur dalam satu ekosistem konflik yang tidak terputus. Dalam konteks tersebut, kampanye militer non-kinetik menjadi bentuk evolusi strategis yang menempatkan pengaruh, legitimasi, dominasi narasi, dan ketahanan masyarakat sebagai variabel kunci keberhasilan pertahanan, menggantikan asumsi lama bahwa kemenangan hanya ditentukan oleh daya tembak atau penguasaan wilayah fisik. Sebagaimana ditegaskan Fox (2018), kemenangan dalam lanskap keamanan masa kini ditentukan oleh kemampuan aktor negara untuk mengatur persepsi publik, menghambat narasi permusuhan, serta mempertahankan kredibilitas kelembagaan melalui operasi psikologis dan informasi yang terencana secara proaktif.

Dalam konteks Indonesia, literatur tentang pertahanan dan keamanan menunjukkan meningkatnya ancaman yang bersifat multidimensi, mulai dari radikalisme berbasis agama, ekstremisme digital, retorika separatisme, hingga kejahatan transnasional berbasis jaringan, terutama di wilayah garis depan, kawasan perbatasan, dan koridor pembangunan strategis seperti Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Kajian oleh Nainggolan (2020) dan Yuniarti (2024) menekankan bahwa meskipun kejadian teror fisik cenderung menurun, pola radikalisme beralih ke ruang digital, di mana propaganda ekstremis, perekrutan daring, serta pembentukan sel-sel ideologis bawah tanah tetap berlanjut. Fenomena ini sejalan dengan konsep "submerged iceberg threat", di mana elemen permukaan tampak tenang, tetapi struktur ancaman laten beroperasi secara tersembunyi, menunggu momentum untuk mengaktualisasi gangguan.

Dalam literatur keamanan kawasan, terdapat konsensus bahwa negara-negara dengan transisi politik, mobilitas sosial tinggi, serta integrasi ekonomi cepat menjadi wilayah yang rentan terhadap infiltrasi narasi disinformasi, provokasi identitas, dan operasi pengaruh asing. Kalimantan Timur sebagai episentrum pembangunan IKN menghadapi risiko serupa akibat lonjakan demografis, akses maritim, jalur migrasi ekonomi, dan perhatian internasional yang meningkat. Hal ini selaras dengan kajian *strategic frontier theory* yang menyatakan bahwa wilayah baru dengan nilai geopolitik tinggi sering kali menjadi target operasi pengaruh baik oleh aktor negara kompetitor maupun jaringan non-negara berkepentingan.

Literatur juga menyoroti pentingnya pendekatan pertahanan dan keamanan terpadu antara alat pertahanan negara (TNI) dengan alat penegakan hukum dan keamanan dalam negeri (Polri). Penataan koordinasi ini telah lama menjadi wacana akademik dan kebijakan di negara demokrasi maju. Model seperti *Singapore Home Team*, *NATO Hybrid Defence Framework*, dan *Total Defence Strategy* negara-negara Nordik menunjukkan bahwa sinergi antar-institusi merupakan keharusan dalam menghadapi ancaman asimetris. Namun, dalam konteks Indonesia, ketiadaan Undang-Undang Keamanan NKRI menciptakan ruang kosong regulatif yang menyebabkan fragmentasi mandat, potensi tumpang tindih fungsi, dan anggapan adanya ketidakpastian komando ketika menghadapi ancaman hibrida. Regulasi terkait masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, mengakibatkan kesenjangan harmonisasi strategi dan tantangan dalam integrasi respons operasional lintas lembaga.

Sistem keamanan NKRI dirancang bersifat bertingkat dan adaptif. Dalam situasi normal, Polri menjadi *leading sector* keamanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun saat terjadi peningkatan ancaman, Polri dapat bekerja sama dengan TNI melalui mekanisme *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* sebagaimana diatur dalam

UU No. 3 Tahun 2025 Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan catatan pelibatan unsur militer **harus melalui keputusan politik negara oleh Presiden.**

Dalam kondisi darurat militer atau perang, TNI mengambil alih peran utama, sementara Polri tetap menjalankan fungsi kepolisian di wilayah sipil dan rear area. Sistem ini memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil.

Literatur menunjukkan bahwa keamanan nasional Indonesia bersifat dinamis dan bertingkat, di mana Polri memimpin pada masa damai dan TNI berperan saat eskalasi ancaman meningkat. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (4), UU No. 2 Tahun 2002, dan UU No. 3 Tahun 2025, konsep keamanan bertingkat ini memungkinkan transisi komando dari Polri ke TNI melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan keputusan politik Presiden.

Tabel berikut menggambarkan pembagian tanggung jawab keamanan berdasarkan tingkat ancaman nasional :

Tingkat Ancaman / Kondisi	Leading Sector	Peran Polri	Peran TNI	Dasar Hukum
Normal (Damai)	Polri	Menjaga kamtibmas, penegakan hukum, pelayanan masyarakat	Tidak terlibat langsung	UUD 1945 Pasal 30 ayat (4); UU No. 2/2002
Gangguan Kamtibmas Meningkat	Polri	Preemptif, preventif, represif; koordinasi lintas lembaga	OMSP atas keputusan Presiden	UU No. 2/2002; UU No. 3/2025 Pasal 7 (2b)
Darurat Sipil	Polri (Presiden/Gubernur)	Tetap leading sektor keamanan	Membantu secara perbantuan	UU No. 23/1959; UU No. 2/2002
Darurat Militer	TNI	Menjalankan fungsi kepolisian sipil	Mengambil alih komando pertahanan-keamanan	UUD 1945 Pasal 30 (2)-(3); UU No. 3/2025
Keadaan Perang	TNI	Kamtibmas dan rear area	Pertahanan penuh	UUD 1945 Pasal 30 (2); UU No. 3/2025

Tabel: demarkasi peran dan Tanggungjawab TNI-Polri

Selain dimensi legalistik, kajian akademik nasional menekankan pentingnya kapasitas kognitif dan ketahanan sosial sebagai bagian utama dari strategi pertahanan modern. Penelitian mengenai deradikalisasi dan kontra-ekstremisme menegaskan relevansi pendekatan *soft power* berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan kebangsaan, penguatan literasi digital, serta pembentukan sistem peringatan dini sosial. Poin ini menegaskan bahwa keamanan negara bukan hanya tugas institusi formal, tetapi juga produk kemitraan yang solid antara negara dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, literatur semakin menyoroti perlunya pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society*, di mana pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta berperan kolektif dalam menahan laju ancaman kognitif dan digital.

Dalam konteks pertahanan non-kinetik, penelitian terbaru di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa strategi yang efektif melibatkan integrasi operasi psikologis, keamanan siber, fusi intelijen, pemantauan media, serta penguatan narasi kebangsaan. Model ini menegaskan bahwa pertahanan kognitif dan spiritual bangsa, termasuk penguatan nilai Pancasila, menjadi garis depan dalam mencegah fragmentasi ideologis. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa negara yang berhasil dalam pertahanan non-kinetik membangun budaya kewaspadaan nasional yang berkelanjutan, bukan hanya reaktif terhadap insiden.

Dari sintesis berbagai kajian tersebut, penelitian ini menempatkan kampanye non-kinetik sebagai inti pembaruan strategi pertahanan Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kombinasi antara operasi psikologis, perlindungan digital, pemberdayaan masyarakat, serta integrasi kelembagaan TNI dengan Polri dipandang sebagai kebutuhan strategis dalam melindungi ruang kedaulatan baru negara. Dengan demikian, tinjauan literatur ini tidak hanya membangun dasar teoritis penelitian, namun juga memperkuat urgensi

transformasi pertahanan Indonesia menuju arsitektur keamanan komprehensif yang adaptif, humanis, dan berorientasi masa depan.

Dalam konteks pembangunan IKN, relevansi literatur mengenai cognitive warfare dan information dominance ternyata semakin nyata terjadi. Serangan hoaks, manipulasi algoritma media sosial, serta penyalahgunaan AI untuk membuat konten disinformasi memperkuat argumen bahwa Kalimantan Timur saat ini menjadi ajang 'perang tanpa senjata'. Oleh karena itu, sebagai contoh literatur internasional tentang non-kinetic warfare seperti yang diterapkan dalam konflik Rusia–Ukraina dan perang dagang AS–China menjadi penting untuk diadaptasi dalam arsitektur keamanan NKRI.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini meletakkan ancaman asimetris sebagai variabel independen dan strategi non-kinetik sebagai variabel dependen. Keduanya dihubungkan melalui peran sinergis TNI dengan Polri dalam menjaga keamanan negara Indonesia . Ancaman asimetris menyerang ideologi, sosial, dan informasi, sementara strategi non-kinetik merespons melalui diplomasi publik, komunikasi strategis, dan kontra-narasi ideologi. Hubungan ini membentuk pola *dynamic equilibrium* antara pertahanan dan keamanan.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji karakteristik strategis dan operasional dari integrasi pertahanan non-kinetik di Kalimantan Timur dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pendekatan ini dipilih karena isu keamanan kontemporer, khususnya ancaman asimetris dan operasi non-kinetik, memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, politik, kelembagaan, dan psikologis yang tidak dapat ditangkap secara komprehensif oleh metode kuantitatif. Studi kasus Kalimantan

Timur dipilih secara purposif (*purposive sampling*) karena posisinya sebagai pusat pemerintahan baru Republik Indonesia yang menjadi etalase keamanan Indonesia sekaligus wilayah frontliner bagi ancaman hibrida, baik dari internal maupun eksternal negara. Pendekatan ini sangat memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana fenomena disinformasi digital, hoaks, dan penggunaan AI di media sosial menjadi bagian dari lanskap ancaman asimetris di Kalimantan Timur.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis dokumen yang mencakup dokumen kebijakan nasional, doktrin strategis pertahanan dan keamanan negara, peraturan pemerintah, laporan keamanan instansi terkait, publikasi resmi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Dokumen tersebut mencakup kebijakan TNI, Polri, BNPT, Kementerian Pertahanan, serta laporan situasi keamanan regional Kalimantan. Kedua, dilakukan analisis wacana terhadap pernyataan resmi pejabat negara, pidato kebijakan, rilis media pemerintah, serta publikasi lembaga pemerintahan dan keamanan untuk mengidentifikasi narasi negara terkait ancaman hibrida dan strategi respons non-kinetik. Ketiga, penelitian ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan keamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta akademisi pertahanan untuk memperoleh perspektif operasional, sosial, dan strategis secara triangulatif.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan pendekatan induktif. Tahapan analisis mencakup coding terbuka terhadap seluruh data, identifikasi kategori tema, dan pengembangan pola makna untuk menemukan keterkaitan antarfenomena seperti jenis ancaman, mekanisme respons kelembagaan, dinamika sinergi TNI–Polri, serta kondisi ketahanan sosial masyarakat. Proses analisis didukung dengan teknik perbandingan berulang antara data empiris dan kerangka konseptual penelitian untuk memastikan konsistensi temuan.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan

dengan mencocokkan data antara dokumen resmi, pernyataan pejabat, dan wawancara lapangan. Triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi analisis dokumen, wawancara, dan observasi terbatas terhadap dinamika masyarakat dan lingkungan strategis. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan merujuk teori keamanan non-kinetik, teori peperangan hibrida, konsep pertahanan negara, serta pendekatan keamanan manusia. Validasi hasil juga dilakukan melalui cross-check dengan ahli kebijakan keamanan dan akademisi pertahanan nasional untuk mengurangi bias interpretatif.

Proses penelitian ini menekankan prinsip etika ilmiah, termasuk kerahasiaan narasumber, transparansi proses analisis, dan penghargaan terhadap objektivitas akademik. Dengan menerapkan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai formulasi dan implementasi kampanye pertahanan non-kinetik di Kalimantan Timur sebagai bagian dari strategi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman asimetris pada era pembangunan IKN Nusantara.

5. Temuan Penelitian

Evaluasi empiris dan konseptual terhadap lingkungan strategis Indonesia di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ranah non-kinetik merupakan arena utama kompetisi keamanan, di mana aktor ancaman berupaya meraih dominasi pengaruh, penetrasi ideologi, dan disrupti sosial tanpa konfrontasi fisik terbuka. Dalam konteks transformasi Ibu Kota Nusantara (IKN), nilai strategis kawasan ini meningkat signifikan, sehingga intensitas kontestasi tersembunyi dan operasi hibrida juga semakin tinggi. Informasi lapangan dan paparan kelembagaan memperlihatkan keberadaan jaringan simpatisan ekstremis, mantan narapidana terorisme, pengagitasi berbasis keagamaan-politis, serta propaganda radikal daring yang meskipun tampak pasif, tetap reaktif dan adaptif. Fenomena ini sejalan dengan model “gunung es” ekstremisme kekerasan di Indonesia, di mana akar struktural lebih menentukan

tingkat ancaman dibandingkan insiden permukaan yang kasat pancaindra. Temuan juga mengindikasikan bahwa tantangan keamanan di Kalimantan Timur tidak hanya berasal dari aktor internal, tetapi juga dari alur infiltrasi transnasional melalui jalur maritim, jaringan digital, dan mobilitas ekonomi-sosial, sehingga memerlukan postur pertahanan antisipatif dan strategi perlindungan kognitif yang kuat. Dalam konteks tersebut, Desain Kampanye Militer Non-Kinetik dengan Mekanisme Komando Horizontal Joint Task Force (JTF) muncul sebagai solusi operasional krusial yang mengintegrasikan sumber daya TNI–Polri untuk memperkuat pertahanan negara, ketahanan masyarakat, dan kedaulatan informasi. Salah satu temuan kunci adalah meningkatnya aktivitas perang informasi di media sosial pada awal pembangunan IKN terkait isu pembangunan IKN, di mana konten hoaks dan propaganda digital dimanfaatkan untuk menanamkan distrust terhadap institusi negara. Pola ini dapat kita sandingkan dengan kejadian yang menyerupai strategi informasi Rusia terhadap Ukraina sebelum invasi 2022, serta kampanye siber China terhadap Taiwan melalui penyebaran narasi delegitimasi pemerintahan. Fenomena serupa juga muncul di Kalimantan Timur dalam bentuk disinformasi, rekayasa isu sosial, dan polarisasi identitas.

Temuan menunjukkan bahwa lapisan komando strategis di puncak model ini dirancang untuk menyatukan TNI dan Polri dalam satu mode kepemimpinan gabungan yang bertanggung jawab terhadap harmonisasi arah kebijakan, penetapan prioritas ancaman, dan koherensi operasional. Struktur inti ini mengatasi fragmentasi akibat sistem komando ganda dengan mendorong pengambilan keputusan yang sinkron antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam negeri. Selanjutnya, lapisan formulasi narasi dan prioritas ancaman berfungsi sebagai mesin doktrinal yang mengarahkan komunikasi strategis, membingkai tujuan keamanan, dan menyusun narasi nasional terpadu guna melindungi persepsi publik dari distorsi ekstremis, pengaruh eksternal, dan propaganda destabilisasi. Penekanan pada supremasi narasi ini mencerminkan doktrin perang hibrida modern di mana

dominasi persepsi mendahului keberhasilan di medan fisik. Dalam konteks ini, ancaman asimetris yang bersumber dari ruang digital menunjukkan bahwa kekuatan senjata tidak lagi menentukan stabilitas wilayah, melainkan kemampuan negara mengendalikan arus informasi dan persepsi publik.

Analisis lapangan juga menegaskan peran sentral JTF dengan pola koordinasi horizontal, yang mencerminkan matriks koordinasi terdesentralisasi antara intelijen, unit deteksi dini, operasi teritorial berbasis komunitas, operasi psikologis (PSYOPS), satuan keamanan siber-informasi, serta kemitraan dengan pemerintah daerah. Pola ini mengimplementasikan prinsip interoperabilitas horizontal, memastikan kewaspadaan situasional bersama, dukungan timbal balik, dan pertukaran informasi tanpa hambatan birokrasi. Temuan mengonfirmasi bahwa intelijen dan kemampuan deteksi dini merupakan tulang punggung keunggulan non-kinetik, terutama di wilayah dengan pola ancaman berbasis digital dan kerentanan sosial yang berkembang. Desain JTF juga memperkuat sinergi antara pembinaan teritorial dan pemberdayaan masyarakat, sangat relevan di Kalimantan yang memiliki komposisi etnis beragam, politik sumber daya, dan dinamika demografis yang dapat memicu keretakan identitas jika tidak diimbangi dengan keterlibatan sosial berkelanjutan dan penguatan kohesi masyarakat.

Klaster operasional kedua meliputi komunikasi strategis dan sinkronisasi media, pertahanan siber-informasi, serta pelaksanaan PSYOPS – membentuk triad kapabilitas pengaruh. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas kontra-narasi digital Indonesia masih belum sebanding dengan kecanggihan propaganda ekstremis, sehingga triad ini menjadi instrumen strategis dalam pengamanan IKN. Melalui pertahanan siber terkoordinasi dan perlindungan kognitif proaktif, sistem ini bertujuan memutus kurva radikalisisi sebelum bermuara pada mobilisasi fisik. Komunikasi strategis selaras dengan alur informasi krisis dan mekanisme penguatan kepercayaan publik guna mencegah kekosongan informasi yang rentan dimanfaatkan lawan. PSYOPS di sini berperan sebagai instrumen pengaruh lunak yang bertujuan

menetralsir psikologis ancaman, menangkal indoktrinasi ideologis, memperkuat nasionalisme sipil, serta membangun kewaspadaan masyarakat tanpa menimbulkan kesan militerisasi ruang publik.

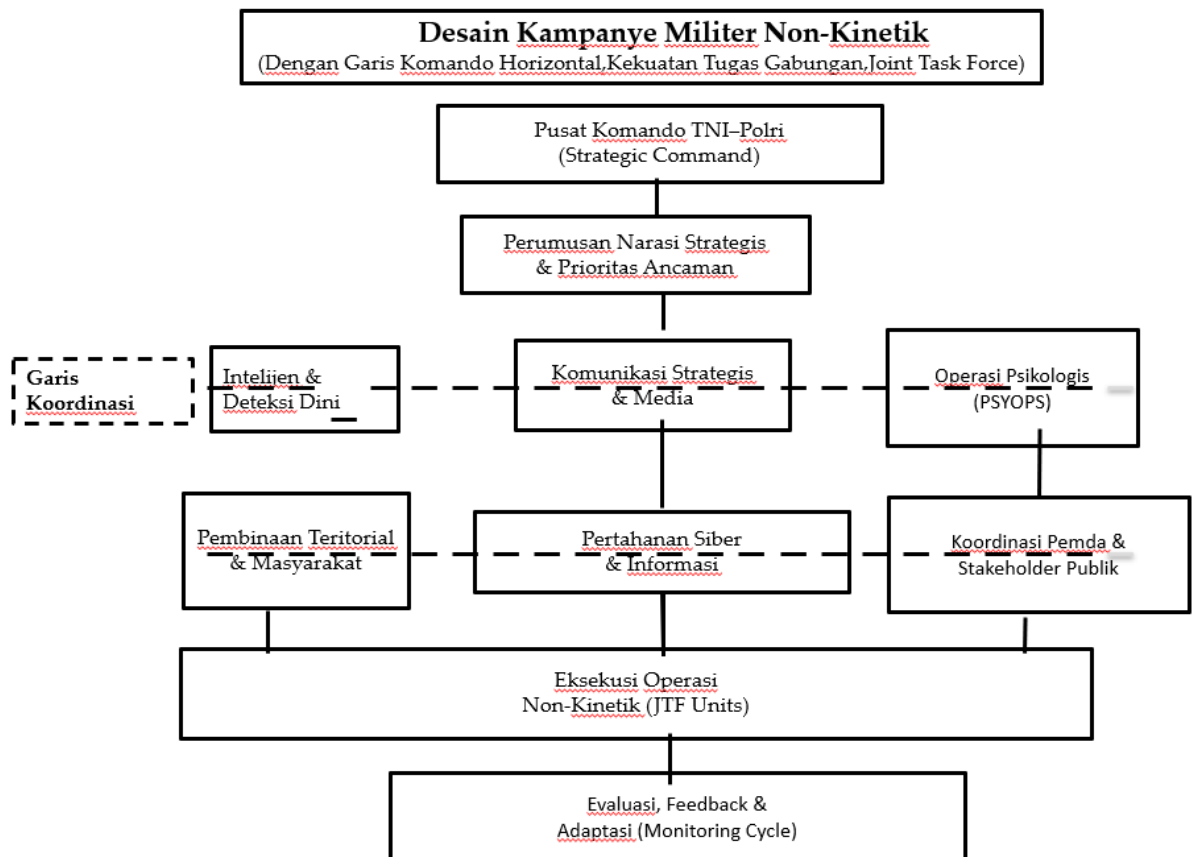
Pilar ketiga — koordinasi regional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan publik — menjadi faktor penentu stabilitas kawasan. Pemerintah daerah, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan media berfungsi sebagai aktor garis depan dalam mendeteksi infiltrasi ideologis dan agitasi sosial sejak dini. Observasi lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi multi-pemangku kepentingan meningkatkan ketepatan pelaporan, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap narasi memecah belah, serta memperkuat legitimasi kehadiran aparat keamanan. Pada lapisan ini, pembinaan teritorial TNI dan fungsi komunitas Polri membentuk tekstur keamanan akar rumput yang mencegah tumbuhnya enclave radikal di wilayah terpencil atau dinamis secara sosial.

Di bagian dasar model terdapat pelaksanaan operasional non-kinetik yang menerjemahkan strategi menjadi aksi lapangan oleh unit JTF lintas domain — mulai dari proteksi siber, pengawasan intelijen, penyebaran PSYOPS, edukasi komunitas, tim pendamping masyarakat, hingga koordinasi respons media. Proses ini ditutup dengan siklus evaluasi-umpan balik-adaptasi berkelanjutan yang menegaskan bahwa keberhasilan pertahanan modern bergantung pada pembelajaran dinamis, pemantauan ancaman real-time, dan penyesuaian iteratif sesuai evolusi perilaku ancaman hibrida.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa arsitektur kampanye non-kinetik yang diusulkan mampu mengintegrasikan fungsi inti untuk melindungi IKN dari ancaman asimetris, hibrida, dan kognitif: sinkronisasi komando pusat, dominasi narasi, fusion intelijen-kepolisian, pertahanan masyarakat, penguatan siber, operasi pengaruh psikologis, serta siklus peningkatan berkelanjutan. Model ini konsisten dengan kebutuhan keamanan kontemporer Indonesia dan karakteristik sosio-geografis Kalimantan Timur, sekaligus menegaskan keselarasan

antara pertahanan nasional dan legitimasi demokratis melalui kemitraan masyarakat dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama keamanan negara.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa Desain Kampanye Militer Non-Kinetik dengan Garis Komando Horizontal Joint Task Force (JTF) adalah pendekatan paling relevan dalam merespons spektrum ancaman asimetris di kawasan ini. Model tersebut menempatkan koordinasi TNI-Polri sebagai pusat kendali strategis untuk mencegah fragmentasi komando, memastikan keselarasan kebijakan, dan mempercepat respons terhadap ancaman multi-domain.



Gambar : Desain Kampanye Militer Non-Kinetik (Dengan Garis Komando Horizontal Joint Task Force) (Sumber: Peneliti, 2025)

Bagan ini menggambarkan kerangka strategi pengamanan non-kinetik yang digunakan untuk menghadapi ancaman asimetris di kawasan Ibu Kota Negara (IKN)

Nusantara, Kalimantan Timur. Model ini dirancang untuk mensinergikan kemampuan TNI dan Polri dalam satu sistem operasi terpadu melalui pendekatan Horizontal Joint Task Force (JTF). Pendekatan ini dipilih karena ancaman terhadap IKN bersifat lintas-domain, tidak linear, adaptif, dan berakar pada ruang sosial-ideologis serta digital, sehingga memerlukan struktur koordinasi yang fleksibel namun terintegrasi.

Model ini bekerja dari atas ke bawah, mulai dari pembentukan komando strategis, perumusan narasi dan prioritas ancaman, koordinasi fungsional antar-unit, eksekusi operasi non-kinetik, hingga evaluasi dan adaptasi terus-menerus. Secara garis besar, model ini mencerminkan tiga domain utama pertahanan modern:

6. Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengamanan Kalimantan Timur sebagai pusat strategis baru Republik Indonesia menuntut perubahan paradigma dari model pertahanan tradisional yang berorientasi pada kekuatan militer fisik menuju postur keamanan non-kinetik yang bersifat terintegrasi, adaptif, dan berbasis pengaruh. Model ini mengedepankan supremasi narasi, kedaulatan informasi, serta ketahanan sosial sebagai fondasi utama keamanan nasional, sejalan dengan teori kontemporer yang menyatakan bahwa kekuasaan modern dijalankan melalui pembentukan persepsi, pengendalian ruang digital, dan pelibatan populasi, bukan melalui koersivitas fisik semata. Dalam hal ini, keberhasilan operasi pertahanan bergantung pada kemampuan negara untuk menguasai domain kognitif dan siber, menanamkan ketahanan ideologis, serta membangun partisipasi masyarakat sebagai mitra aktif dalam keamanan.

Arsitektur Joint Task Force (JTF) non-kinetik yang diperkenalkan dalam penelitian ini meneguhkan bahwa strategi antisipatif dan berbasis intelijen jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan represif yang bersifat reaktif. Model ini sejalan dengan praktik pertahanan hibrida negara-negara maju, seperti *Singapore Home Team*,

kerangka *Comprehensive Defence* NATO, dan ekosistem intelijen terintegrasi Australia, yang menempatkan pencegahan, koordinasi lintas-lembaga, dan pemaduan sumber daya publik sebagai prinsip utama. Berbeda dari struktur komando hierarkis konvensional, mekanisme komando horizontal dalam model ini membatasi praktik *stovepiping* dan silo kelembagaan, sehingga memperkuat sinkronisasi lintas institusi secara real-time. Dengan demikian, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta komunitas lokal berperan sebagai ko-produser keamanan, mencerminkan kerangka *whole-of-nation defence* yang terbukti efektif menghadapi perang kognitif, radikalisme ideologis, serta kompetisi *gray-zone*.

Dalam konteks ancaman nyata di Kalimantan Timur, sinergi TNI dengan Polri menjadi faktor pembeda. Kolaborasi antara Pusinfolahta TNI dan Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam patroli siber serta penindakan hoaks tentang proyek IKN merupakan contoh konkret penerapan kampanye non-kinetik nasional. Operasi Kepolisian oleh Polri yang diintegrasikan dengan OMSP TNI di Kaltim juga menunjukkan bentuk kerja sama horizontal dalam mengendalikan opini publik dan memperkuat kehadiran negara di tingkat komunitas sesuai dengan pertanggungjawaban pada tingkatan Keamanan NKRI.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa kerentanan hibrida di Kalimantan Timur tidak hanya bersumber dari ancaman radikal atau kejahatan lintas batas, tetapi juga dari faktor struktural, seperti dinamika demografis yang berkembang cepat, penetrasi digital yang melampaui kesiapan literasi masyarakat, sensitivitas identitas sosial, dan proses penataan ulang tata kelola di wilayah yang akan menjadi ibu kota negara. Dalam kondisi tersebut, rekayasa kesadaran publik (*cognitive engineering*), pengelolaan kepercayaan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas menjadi krusial guna menghindari polarisasi sosial, mobilisasi keluhan sosial, dan perlombaan narasi elit yang dapat mengganggu legitimasi dan stabilitas politik.

Keunggulan khas Indonesia terletak pada sinergi fungsional antara peran teritorial TNI dan pendekatan *community policing* Polri. Jika dipadukan dengan disiplin narasi, etika operasi, serta kepekaan terhadap ruang sipil, pendekatan ini memungkinkan negara membentuk persepsi dan ketahanan masyarakat tanpa mengurangi prinsip demokrasi. Integrasi kemampuan PSYOPS, komunikasi strategis, pertahanan siber, dan kolaborasi sipil tidak hanya menetralkan ancaman, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesetiaan konstitusional sebagai titik acuan moral masyarakat di tengah dinamika ideologi global.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan kebijakan dan tantangan normatif. Absennya Undang-Undang Keamanan NKRI menyebabkan ambiguitas operasional dan potensi tumpang tindih yurisdiksi dan kurangnya pemahaman akan pertanggungjawaban tugas masing-masing sehingga memperkuat urgensi pembentukan landasan hukum yang secara formal menginstitusikan sinergi sipil-militer sambil memastikan supremasi sipil serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, temuan pada ranah digital menunjukkan bahwa aktor non-negara sering kali lebih cepat beradaptasi dalam ruang informasi, memanfaatkan resonansi emosional, algoritma media sosial, serta simbolisme keagamaan untuk mempengaruhi publik. Oleh karena itu, negara harus mengembangkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, seperti penghapusan konten (*takedown*), namun bergerak ke arah produksi pengaruh yang proaktif, penguatan *soft power*, serta peningkatan literasi digital publik.

Penerapan model ini menuntut kemampuan negara untuk mengembangkan *influence professionals*, operator informasi, dan spesialis kontra-radikalisasi yang memiliki kompetensi budaya, kecakapan digital, serta otoritas moral. Lebih jauh, strategi ini mengharuskan negara mengembangkan ekosistem pembelajaran adaptif melalui siklus evaluasi, umpan balik, dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan intelijen lapangan dan persepsi publik. Dengan demikian, keamanan tidak lagi

bersifat episodik dan seremonial, tetapi menjadi proses dinamis dan berkelanjutan yang mengakar dalam struktur sosial dan pemerintahan.

Pada akhirnya, Kalimantan Timur tidak hanya diposisikan sebagai pusat pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai laboratorium transformasi pertahanan nasional Indonesia. Postur non-kinetik ini menjadikan pikiran, kepercayaan, dan kesatuan nasional sebagai objek pertahanan utama, menempatkan rakyat sebagai pusat pertahanan negara, dan mengubah operasi non-kinetik dari sekadar komponen taktis menjadi doktrin strategis bagi kedaulatan Indonesia di era persaingan kognitif dan informasi global.

Dengan meningkatnya penggunaan AI dan big data untuk propaganda politik, kolaborasi strategis TNI–Polri perlu diperkuat melalui pembentukan Satgas Siber Gabungan di wilayah IKN, yang fokus pada proteksi infrastruktur digital, kontra-narasi ideologi, serta pengendalian krisis informasi. Ini menjadi representasi nyata kampanye militer non-kinetik Indonesia di lapangan.

Kampanye militer non-kinetik TNI–Polri terbukti relevan menghadapi ancaman asimetris modern di Kalimantan Timur. Ancaman tidak lagi datang dari kekuatan bersenjata, tetapi dari serangan informasi dan persepsi publik. Oleh karena itu, sinergi TNI dan Polri perlu dilembagakan dalam bentuk kebijakan nasional dan MoU resmi sebagai dasar pelaksanaan OMSP di ranah keamanan dalam negeri.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi keamanan yang menyertai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur menuntut penguatan doktrin pertahanan non-kinetik secara institusional di Indonesia. Doktrin tersebut harus berakar pada ketahanan kognitif, informasi, hukum, dan sosial, di mana TNI dan Polri beroperasi sebagai pilar sinergis stabilitas nasional, bukan sebagai entitas paralel yang merespons gejala ancaman secara terpisah. Realitas empiris yang

ditemukan—mulai dari jaringan radikalisme laten, ekstremisme digital, sensitivitas identitas, mobilitas demografis, hingga ancaman hibrida lintas batas—menunjukkan bahwa strategi pertahanan berbasis kekuatan fisik semata tidak lagi memadai. Kemampuan negara dalam membentuk persepsi publik, menjaga ruang informasi, serta membangun kepercayaan dan ketahanan sosial menjadi batas depan pertahanan strategis Indonesia di era kompetisi kognitif.

Kerangka *Horizontal Joint Task Force* yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan mekanisme operasional untuk mewujudkan paradigma tersebut melalui penyatuan komando strategis, integrasi intelijen tanpa sekat institusional, pengendalian narasi secara terpadu, pelibatan aktif masyarakat, serta mekanisme umpan balik adaptif yang bergerak dinamis mengikuti evolusi ancaman. Model ini memastikan bahwa Indonesia mampu merespons ancaman lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih akurat, sekaligus menjaga legitimasi demokrasi dan ruang sipil yang inklusif.

Untuk memastikan implementasi dan keberlanjutan arsitektur pertahanan non-kinetik ini, sejumlah rekomendasi kebijakan muncul sebagai prioritas strategis:

- a. Mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan NKRI (yang mengintegrasikan semua keamanan yang mencakup keamanan dalam negeri/*internal security*, keamanan negara/*state security*, dan keamanan nasional/*national security*) sebagai regulasi ini menjadi landasan hukum bagi tata kelola pertahanan terpadu, mengklarifikasi otoritas lintas lembaga, serta menjaga akuntabilitas dan pengawasan demokratis.
- b. Membangun kerangka komando gabungan permanen TNI dengan Polri untuk operasi non-kinetik. Termasuk penyusunan doktrin bersama, standar pelatihan, interoperabilitas digital, dan prosedur operasi terpadu serta penentuan pertanggungjawaban pada masing-masing tingkatan keamanan.
- c. Memperkuat ketahanan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan, sistem peringatan dini komunitas, dan pemberdayaan

organisasi masyarakat sipil. Masyarakat perlu berperan sebagai garda depan dalam mencegah infiltrasi ideologi ekstrem, disinformasi, dan konflik identitas.

d. Mengembangkan kapabilitas pertahanan kognitif dan pengaruh digital nasional. Termasuk pusat komunikasi strategis, satuan pertahanan psikologis, dan integrasi sistem siber-intelijen nasional untuk memproteksi ruang digital negara.

e. Mendirikan platform pembelajaran berkelanjutan untuk adaptasi strategi. Sistem ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan berbasis dinamika ancaman lapangan dan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa kebijakan keamanan selalu relevan dan responsif.

Melalui pendekatan ini, Kalimantan Timur tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan, tetapi juga menjadi prototipe kesiapsiagaan pertahanan nasional abad ke-21, di mana kedaulatan negara dijaga melalui integritas kelembagaan, kekuatan sosial, dan keunggulan dalam *battle of ideas*. Dengan demikian, paradigma pertahanan Indonesia bergeser menuju model yang menekankan pencegahan melalui pengaruh, ketahanan masyarakat, dan dominasi narasi, menjadikan IKN sebagai titik awal transformasi strategi pertahanan nasional menuju era keamanan kognitif-informasional.

Dinamika perang non-kinetik global seperti yang terjadi di Rusia–Ukraina dan Amerika Serikat–China membuktikan bahwa dominasi narasi dan pengaruh digital menjadi komponen utama dalam memenangkan konflik modern. Dalam konteks Indonesia, Kalimantan Timur menjadi laboratorium penerapan konsep tersebut, yaitu bagaimana pertahanan dibangun bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan informasi dan kesadaran nasional yang bersinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arquilla, J., & Ronfeldt, D. (1996). *The advent of netwar*. RAND Corporation.
- Brands, H., & Yoshihara, T. (2019). *What to expect from great-power competition*. Center for Strategic & Budgetary Assessments.
- Buffaloe, D. L. (2006). *Defining asymmetric warfare*. U.S. Army War College, Strategic Studies Institute.
- Fox, A. C. (2018). *The non-kinetic battlespace: An overview*. Modern War Institute at West Point.
- Gerasimov, V. (2016). The value of science in foresight: New challenges require rethinking forms and methods of warfare. *Military Review*, 96(1), 23–29.
- Hoffman, F. G. (2018). *The evolution of hybrid warfare and key challenges*. Joint Forces Quarterly, 52(1), 34–39.
- Kilcullen, D. (2019). *The dragons and the snakes: How the rest learned to fight the West*. Oxford University Press.
- Nainggolan, P. (2020). National security and asymmetric threats in Indonesia. *Journal of Defence & State Policy*, 12(3), 45–59.
- Osinga, F., & Sweijs, T. (2021). *A new era of strategic competition: Grey zone operations*. The Hague Centre for Strategic Studies.
- Pambudhi, D. (2024). Political demography and national capital development in East Kalimantan. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 14(1), 85–103.
- Petronila, A. (2023). Harmonization of Indonesian military and police roles in counterterrorism. *Journal of Southeast Asian Security Studies*, 9(2), 115–132.
- Prakoso, A., & Mahroza, J. (2024). Military strategy transformation in Indonesia's defence modernization. *Indonesian Journal of Strategic Studies*, 6(1), 1–18.
- Rid, T. (2020). *Active measures: The secret history of disinformation and political warfare*. Farrar, Straus and Giroux.
- Ryan, M. (2022). *War transformed: The future of twenty-first century great power competition and conflict*. Naval Institute Press.

- Singer, P. W., & Brooking, E. T. (2018). *LikeWar: The weaponization of social media*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Suryanto, H. (2024). Counter-radicalism dynamics in East Kalimantan amid IKN development. *Jurnal Kebijakan Keamanan Nasional*, 5(2), 77–94.
- Yulianto, A., & Thamrin, R. (2022). Post-conflict radicalization patterns in Sulawesi and NTB. *Jurnal Kajian Terorisme*, 3(2), 43–60.
- Yuniarti, M. (2024). Social vulnerability and digital extremism in Indonesia. *Journal of Asian Homeland Security*, 11(1), 66–82.

Sumber Kebijakan & Data Indonesia

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2025). *Laporan tahunan pencegahan ekstremisme dan terorisme*. BNPT RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Dokumen Kebijakan Pertahanan Negara 2025–2030*. Kemhan RI.
- Kodam VI/Mulawarman. (2024). *Laporan situasi keamanan Kalimantan 2023–2024*. Tentara Nasional Indonesia AD.
- Lemhannas RI. (2024). *Indeks ketahanan nasional provinsi di Indonesia*. Lemhannas Republik Indonesia.